

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Jl. Pattimura No. 02 Pekanbaru



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,



S.E. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR 31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja 2024 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renja PD tahun sebelum dan Perubahan Renstra PD tahun 2019-2024.

Penyusunan Renja 2024 ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam suatu kerjasama yang sangat baik. Namun demikian hasil penyusunan Renja ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau.

Pekanbaru, September 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN 2022	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	26
2.4. Review Terhadap RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	66
BAB V. PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	10
2.2 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022.....	22
2.3 Produksi Daging Ruminansia.....	27
2.4 Target dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan populasi dan Produksi Tahun 2022.....	29
2.5 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tigas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.7 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	44
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024	51
3.2 Rumusan Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	55
4.1 Rencana Program/Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Disamping itu Renja PD juga bersinergi dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat enam (6) Tahapan utama dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yakni: persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tahap penyusunan rancangan Awal Renja

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
- 18) Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- 19) Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74);
- 20) Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- 21) Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024;
- 22) Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dimaksudkan untuk menjabarkan perencanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

di Provinsi Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 yang dituangkan dalam program dan kegiatan PD.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan visi, misi yang diaplikasikan melalui program kegiatan PD dengan sasaran yang mengacu kepada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, serta memuat usulan dari masyarakat yang tertuang didalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang gambaran umum penyusunan Rancangan Renja PD ; latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab ini memuat tingkat capaian kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, memuat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dalam bab ini juga memuat tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD serta formulasi isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan uraian tentang proses yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan, usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan dan uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja PD tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi PD saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	7.444	Persen	2,53	Persen	1,85	Persen	23.920.244.715	(2,71)	- 146,49	1,85	1,67	0,02
3.27.02.103	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	7	kelompok	0	kelompok	2	kelompok	67.940.000	2	100,00	2	4,00	57,14
3.27.02.103.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	8	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	67.940.000	1	100,00	1	7,00	87,50
3.27.02.104	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	3.920	Ton	-	Ton	720	Ton	396.300.000	631	87,64	1.250	1.881,00	47,98
3.27.02.104.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	15	Laporan	7	Laporan	1	Laporan	396.300.000	1	100,00	1	9,00	60,00
3.27.02.105	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13,20	Persen	10,91	Persen	12,95	Persen	316.355.000	11	81,24	13	17,27	130,80
3.27.02.105.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	37	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	211.630.000	12	100,00	12	25,00	67,57
3.27.02.105.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	19	Laporan	1	Laporan	6	Laporan	104.725.000	6	100,00	6	13,00	68,42
3.27.02.107	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)/ST	3.504	ST (Satuan Ternak)	0	ST (Satuan Ternak)	1883	ST (Satuan Ternak)	23.139.649.715	490	26,02	175	665,00	18,98
3.27.02.107.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	3.504	Ekor	0	Ekor	1883	ekor	23.139.649.715	490	26,02	2.210	2.700,00	77,05
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	0	Persen	5	Persen	870.721.461	5	100,00	27	32,00	50,00
3.27.03.101	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	64	Persen	0	Persen	5		870.721.461	5	100,00	65	35,00	54,69

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6			7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.03.101.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	4 Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	870.721.461	1	100,00		1	3,00	75,00
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	9 Persen	0 Persen	3	Persen	2.408.639.462	3	100,00		5	8,00	88,89
3.27.07.102	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya	202	10	35		2.408.639.462	20	57,14		65	95,00	47,03
3.27.07.102.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (kelompok)	661 kelompok	661 kelompok	576	kelompok	2.408.639.462	576	100,00		661	949	143,57
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen) 2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	2,2 Persen 40,0 Persen	2,10 Persen 10 Persen	2,8 Persen 10,0 Persen		6.911.877.545	3,1 30,0	89,29 300,00		2,50 10	1,93 50,00	87,50 125,00
3.27.04.101	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	40 Persen	10 Persen	10	Persen	6.097.090.989	(15)	150,00		10	5,00	12,50
3.27.04.101.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	144 Laporan	36 Laporan	36	Laporan	6.097.090.989	36	100,00		36	108,00	75,00
3.27.04.102	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90 Persen	60 Persen	70	Persen	537.140.316	59	83,57		80	69,25	76,94
3.27.04.102.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	62 Laporan	18 Laporan	44	Laporan	137.140.316	44	100,00			62,00	100,00
3.27.04.102.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (Laporan)	240 Laporan	60 Laporan	60	Laporan	400.000.000	60	100,00		60	180,00	75,00
3.27.04.104	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29 Unit	27 Unit	25	Unit	277.646.240	30	120,00		27	32,00	110,34
3.27.04.104.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan (Sertifikat)	179 Sertifikat	11 Sertifikat	48	Sertifikat	138.909.720	52	108,33		52	115,00	64,25
3.27.04.104.02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	90 Orang	0 Orang	30	Orang	138.736.520	30	100,00		30	60,00	66,67

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022		REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	98	Persen	100	Persen	23.598.449.517	97	97,47	100	99	98,74
3.27.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	5	Laporan	5	Laporan	5	Laporan	17.581.512.920	5	100,00	5	5,00	100,00
3.27.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	5.508	Orang Bulan	1092		1.476	Orang Bulan	17.581.512.920	1.219	82,59	1.416	3.727,00	67,67
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	5	Jenis Layanan	5	Jenis Layanan	5	Jenis Layanan	1.495.046.808	5	100,00	5	5,00	100,00
3.27.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	60.654.610	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	353.488.061	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	Paket	1	Paket	1	Paket	194.538.572	1	100,00	3	5,00	62,50
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	73.910.768	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	812.454.797	12	100,00	12	36,00	75,00
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	14	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3.407.390.014	3	100,00	4	10,00	71,43
3.27.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	20.400.000	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	929.512.740	12	100,00	12	36,00	75,00
3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	2.457.477.274	12	100,00	12	36,00	75,00
3.27.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	19	Jenis	3	Jenis	4	Jenis	1.114.499.775	4	100,00	5	12,00	63,16
3.27.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	45	Unit	9	Unit	16	Unit	549.270.000	16	100,00	1	26,00	57,78
3.27.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	123	Unit	51	Unit	58	Unit	76.600.000	34	58,62	19	104,00	84,55

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	22	Unit	121	Unit	7	Unit	188.649.775	7	100,00	4	132,00	600,00
3.27.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	Unit	0	Unit	1	Unit	299.980.000	1	100,00	1	2,00	66,67
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK			365				107		3.035.342.513	-	-			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	Persen	2,53	Persen	1,85	Persen	2.004.895.315	(2,71)	- 146,49	1,85	1,67	90,27
3.27.02.104	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)	171.000	Dosis	50707	Dosis	50.000	Dosis	1.347.895.315	47.655	95,31	42.000	140.362,00	82,08
3.27.02.104.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)	37	Orang	12	Orang	12	Laporan	1.347.895.315	12	100,00	12	36,00	97,30
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	0	Persen	5	Persen	657.000.000	5	100,00	27	32,00	50,00
3.27.03.101	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	74	Persen	60	Persen	62	Persen	657.000.000	62	100,00	70	70,00	94,59
3.27.03.101.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	12	Unit	0	Unit	3	unit	657.000.000	3	100	3	6,00	50,00
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	98	Persen	100	Persen	373.447.198	100	100,00	100	100,00	100,00
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	3	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	59.983.838	3	100,00	2	8,00	266,67
3.27.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	Paket	0	Paket	1	Paket	9.993.683	1	100,00		1,00	33,33
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7	Paket	4	Paket	1	Paket	24.994.000	1	100,00	1	6,00	85,71
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	Paket	0	Paket	1	Paket	24.996.155	1	100,00	1	2,00	66,67
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1	Jenis	0	Jenis	1	Jenis	279.903.360	1	100,00	1	1,00	100,00

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	279.903.360	12	100,00	12	24,00	66,67
3.27.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	1	Jenis	12	Jenis	1	Jenis	33.560.000	1	100,00		-	-
3.27.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4	Unit	1	Unit	1	Unit	33.560.000	1	100,00		2,00	50,00
UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN														
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	0	Persen	5	Persen	798.620.000	5	100,00	27	32,00	50,00
3.27.03.101	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76	Persen	0	Persen	72	Persen	798.620.000	-	-		-	-
3.27.03.101.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	3	Unit	0	Unit	1	Unit	798.620.000	1	100,00		1,00	33,33
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian ternak (Persen)	2,2	Persen	2,10	Persen	2,8	Persen	2.142.631.315	3,1	89,29	2,50	1,93	87,50
3.27.04.101	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10	Persen	10	Persen	10	Persen	1.067.808.675	10	100,00	10	10,00	100,00
3.27.04.101.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	37	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	1.067.808.675	12	100,00	12	25,00	67,57
3.27.04.103	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	70	Unit	10	Unit	15		1.074.822.640	-	-	20	30,00	42,86
3.27.04.103.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1.000	Dokumen	220	Dokumen	250	Dokumen	1.074.822.640	324	129,60	260	804,00	80,40
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	98	Persen	100	Persen	198.055.776	96,67	96,67	100	100,00	100,00

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			6	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	29.698.446	2	100,00	4	9,00	150,00
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	6	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	29.698.446	2	100,00	4	9,00	150,00
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	22.264.000	1,0	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	7.434.446	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	9	Jenis	2	Jenis	1	Jenis	115.822.080	1	100,00	2	5,00	55,56
3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	1	Laporan	12	Laporan	115.822.080	12	100,00	12	25,00	52,08
3.27.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	84	Jenis	0	Jenis	22	Jenis	52.535.250	22	100,00	1	23,00	27,38
3.27.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	Unit	0	Unit	2	Unit	32.995.250	2	100,00		2,00	50,00
3.27.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	24	Unit	0	Unit	20	Unit	19.540.000	20	100,00	3	23,00	95,83
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN														
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	7	Persen	2,53	Persen	1,85	Persen	1.317.829.570	(2,71)	- 146,49	1,85	1,67	22,57
3.27.02.105	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit ternak yang ber SKLB di UPT (ekor)	50	Ekor	0	Ekor	10	Ekor	1.306.829.570	-	-	15	15,00	30,00
3.27.02.105.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (laporan)	86	Laporan	12	Laporan	24	Laporan	1.306.829.570	24	100,00	24	60,00	69,77
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	64	Persen	0	Persen	5	Persen	364.994.968	5	100,00	27	32,00	50,00
3.27.03.101	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	63	Persen	55	Persen	56	Persen	364.994.968	-	-	60		-
3.27.03.101.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	7	unit	2	unit	1	unit	364.994.968	1	100,00	3	6,00	85,71

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022					TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
							TARGET RENJA PD TAHUN 2022			REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	Persen	98	Persen	100	Persen	210.999.950	96,67	96,67	100	100,00	100,00
3.27.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	6	Jenis Layanan	3	Jenis Layanan	2	Jenis Layanan	11.000.000	2	100,00	3	8,00	133,33
3.27.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	10.000.000	1	100,00	1	3,00	75,00
3.27.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1.000.000	1	100,00		2,00	50,00
3.27.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	1	Jenis	1	Jenis	400.560.256	1	100,00		2,00	66,67
3.27.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	400.560.256	12	100,00	12	36,00	75,00
3.27.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	38	Jenis	5	Jenis	3	Jenis	224.503.902	3	100,00	2	10,00	26,32
3.27.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	Unit	4	Unit	2	Unit	199.999.950	2	100,00		6,00	100,00
3.27.01.109.01 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	Unit	1	Unit	1	Unit	24.503.952	1	100,00	1	3,00	75,00

Dari tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang belum mencapai target.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2022 memiliki 5 (lima) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Non Urusan dengan 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, kemudian 4 (empat) Program Urusan Pilihan Pertanian dengan 10 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan dengan Program yang terdiri dari Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pada Program Non Urusan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan hasil hampir seluruh kegiatan pada program tersebut telah mencapai target. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat realisasi 82.59% dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat realisasi 58.62%.

Sementara pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak mencapai target yakni Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 26.08%.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Dari 27 Sub Kegiatan sebagian besar realisasi kinerjanya telah mencapai target. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%);

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%);
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%);
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (100%);
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%);
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (100%).

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan

Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (100%).

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (100%).
- Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak (100%).

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (100%).

d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (100%).

Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (100%).
- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi (100%).

Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis (100%).

e. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (100%).

2.1.3. Realisasi Program /Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yakni Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan target 48 Sertifikat dengan realisasi sebanyak 52 sertifikat atau 108.33%. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPT LVKH) target 250 dokumen dengan realisasi 324 dokumen atau 129.60%.

2.1.4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Program/Kegiatan

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja beberapa sub kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat realisasi 58.62%, karena pembayaran surat tanda nomor kendaraan dan KIR pada setiap kendaraan jabatan dan operasional menunggu jadwal pengurusan yang telah ditentukan/ sesuai jadwal pembayaran jatuh tempo.

Sementara pada Program Urusan Pilihan Pertanian terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak mencapai target yakni :

- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 26,08%, karena penyediaan ternak sapi sebanyak 1.883 ekor hanya terealisasi sebesar 490 ekor ternak. Kecilnya realisasi pengadaan ternak tersebut karena adanya wabah LSD dan PMK di Riau yang menyebabkan susahna pemasukan ternak dari luar ke riau.

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Peningkatan populasi ternak didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyuluhan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Pada Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat kegiatan yang tidak mencapai target yakni pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain berupa Pengadaan Ternak Sapi sebanyak 1.883 ekor yang terealisasi hanya sebesar 490 ekor. Hal ini tentu mempengaruhi capaian target populasi ternak sebagai target capaian program.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan, maka perlu diperhatikan dan diantisipasi melalui analisis resiko terhadap semua kegiatan dan perlu adanya pengendalian interen dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan pada program dan kegiatan yang melebihi target maka untuk prestasi yang lebih baik lagi perlu dilakukan penambahan target kinerja. Tentunya penambahan target ini dibarengi dengan penambahan anggaran yang dapat mendukung target yang telah ditetapkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah ditentukan di dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau Tahun 2022 (Tabel T-C.30)**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasion	IKK	Target Renstra Perangkat			Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Tukar Usaha Pertanian			101.75	102.35	103.50	99,76 (86,74%)	99.5 (97,21%)	103.50	
2	Produksi Daging (Ton)			59.912	61.096	62.303	65.408 (109,17%)	75.364* (123,35%)	62.303	
3	Persentase Status Kesehatan			95,9	96,6	97,3	94,1 (98%)	94.9 (98,24%)	97.3	
4	Persentase Peningkatan produk hewan yang ASUH (%)			-	5	5	-	4.32 (86,4%)	5	

Ket : * Angka Sementara

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan indikator yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa indikator Produksi Daging telah mencapai target bahkan melebihi target dan tiga indikator yang lain belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target yaitu pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Peternakan, Persentase Status Kesehatan Hewan dan Persentase Peningkatan Produk Hewan yang ASUH (%).

Tercapainya target produksi daging dengan persentase realisasi sebesar 123,35% menunjukkan bahwa Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan outcome yang baik terhadap peningkatan produksi daging. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan

pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Indikator persentase status kesehatan hewan tahun 2022 adalah sebesar 94,9% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,24%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi namun belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya target persentase status kesehatan hewan yaitu posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai, sehingga rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Pada awal tahun 2022, Provinsi Riau dihadapi oleh wabah *Lumpy Skin Disease* (LSD) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 242/KPTS/PK.320/M/2022, tanggal 2 Maret 2022 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022, tanggal : 25 Juni 2022. Penyakit LSD dan PMK merupakan penyakit eksotik yang sebelumnya belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah. Penyakit ini mulai mewabah karena letak Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Influenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan

Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi.

Indikator persentase produk hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 2.2, diketahui bahwa persentase produk hewan yang ASUH pada tahun 2022 adalah sebesar 4,32% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,4% dari yang ditargetkan.

Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting, karena unit usaha merupakan titik awal penentuan kualitas produk hewan, maka penerapan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk harus dijalankan secara konsisten menurut aturan/standar operasional yang berlaku. Selanjutnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol

Veteriner. NKV sebagai border utama pengawasan praktik hygiene sanitasi dan keamanan produk hewan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik nyata dilapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar higiene sanitasi dan penjaminan keamanan pangan yang benar, maka akan menimbulkan dampak atau resiko buruk bagi mutu dan keamanan produk serta kesehatan manusia dan lingkungan. Selain permasalahan penerapan teknis produksi, faktor biaya produksi serta nilai jual produk akan memicu praktik penyimpangan prinsip-prinsip kesmavet.

Bentuk penyimpangan kesmavet dalam hal penerapan hygiene sanitasi dan keamanan pangan yang masih sering ditemukan yaitu proses penanganan karkas di Rumah Potong Hewan Ruminansia yang dilakukan di lantai atau melakukan pemotongan hewan tempat pemotongan hewan yang tidak resmi, penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging beku di pasar tradisional dengan tidak menggunakan sistem penyimpan dingin, pengawasan terhadap produk olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal dll), ketidak patuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis unit usaha dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan dan kasus penyimpangan kesmavet lainnya.

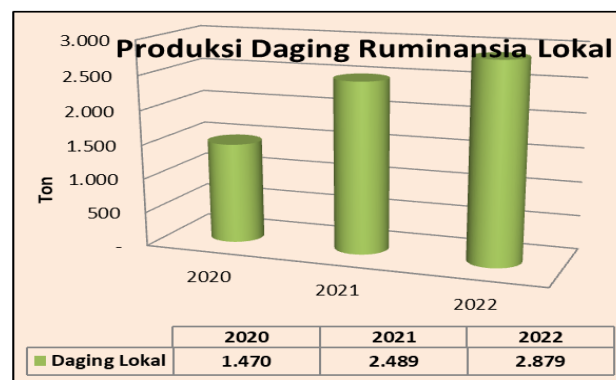
Upaya pemerintah provinsi dalam penjaminan hygiene sanitasi, keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha adalah melalui sertifikasi kontrol veteriner/NKV, namun belum banyak unit usaha yang dapat melakukan pemenuhan persyaratan NKV. Pemenuhan kebutuhan produk hewan sebagian besar dipenuhi dari luar Provinsi Riau, sehingga usaha distributor produk hewan dan usaha ritel produk hewan semakin berkembang, sedangkan unit usaha di dalam daerah yang memproduksi produk hewan masih terbatas, terutama unit usaha Rumah Potong Hewan. Hingga saat ini seluruh RPH-R/RPH-U/RPH-B di Provinsi Riau belum bersertifikasi NKV. Hal ini yang menyebabkan masih rendahnya persentase Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH di Provinsi Riau.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Terkait Pelayanan PD

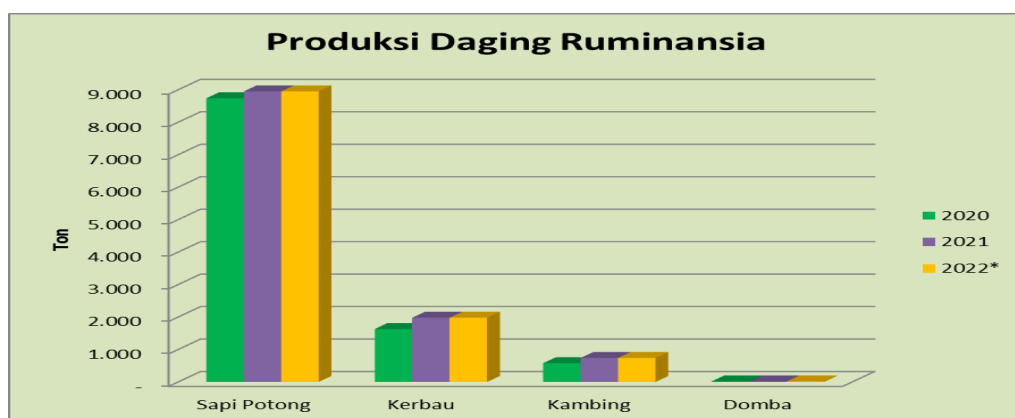
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu tumpuan dalam percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Riau. Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki serta meningkatkan gizi masyarakat, juga merupakan sumber pendapatan masyarakat.

Capaian target produksi daging pada tahun 2022 sesuai tabel 2.2 adalah sebesar 123%. Capaian kinerja ini sudah sangat bagus karena sudah melebihi target yang ditetapkan di Renstra. Produksi daging ruminansia lokal terus mengalami peningkatan, tahun 2022 lebih tinggi bila dibandingkan dengan produksi daging ruminansia lokal pada tahun 2020 dan 2021 .



Gambar 1. Produksi daging ruminansia lokal

Adapun produksi daging ruminansia secara keseluruhan untuk ternak sapi, kerbau dan kambing dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 3.2. Grafik Produksi daging ruminansia

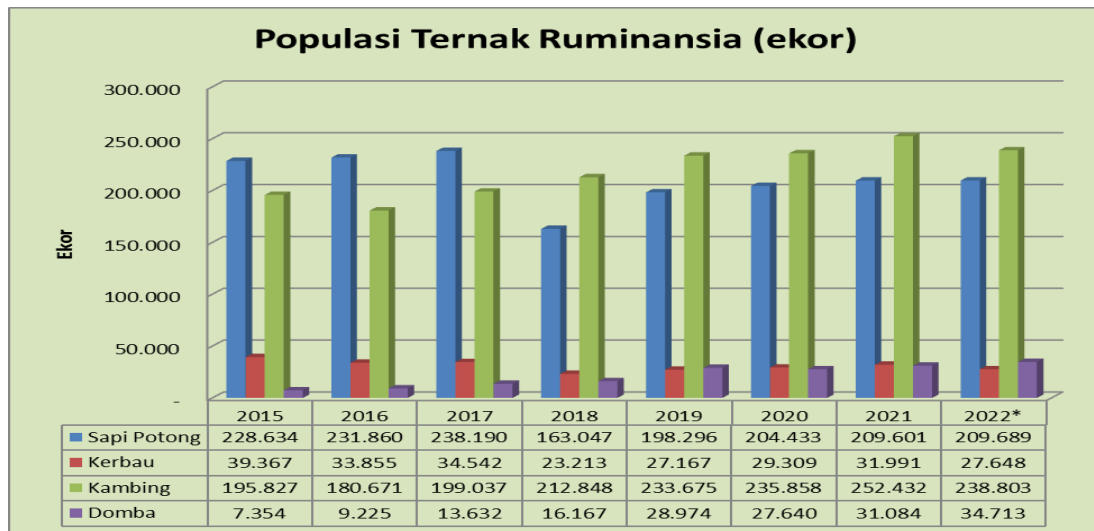
Tabel.2.3. Produksi daging ruminansia (Kg)

Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
Sapi Potong	9.396.286	7.700.427	9.792.531	8.379.100	8.737.301	8.948.696	8.948.696
Kerbau	2.074.966	1.579.985	1.868.530	1.689.403	1.631.055	1.978.715	1.978.715
Kambing	652.278	729.620	826.614	685.156	578.579	741.404	741.404
Domba	15.715	19.084	23.878	27.076	19.879	15.583	15.583
JUMLAH	12.141.261	10.031.133	12.513.570	10.782.753	10.968.834	11.684.398	11.684.398

Dari Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa produksi daging ruminansia Tahun 2022 di Riau sebanyak 11.684 Ton. Sementara berdasarkan Gambar 1. Produksi daging ruminansia lokal sebanyak 2.879 Ton. Jadi dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau baru bisa memenuhi produksi daging ruminansia lokal sekitar 24,64% dari total produksi daging ruminansia, selebihnya merupakan produksi daging dari pemotongan tenak yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan, Kawin alam dan transfer Embrio) dan pendistribusian ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Populasi Ternak Ruminansia

Dari gambar 2. dapat dilihat grafik jumlah populasi cenderung meningkat sebagai hasil dari pelaksanaan optimalisasi reproduksi terutama melalui Inseminasi Buatan. Pada populasi Sapi dari tahun 2015-2017 meningkat menjadi 238.190 ekor. Namun pada tahun 2018 terjadi pengurangan jumlah populasi karena adanya rilis data populasi dari BPS berdasarkan angka Sutas (Survei pertanian antar sensus) yang mana data yang digunakan harus data yang dirilis oleh BPS. Selanjutnya dari data Sutas tahun 2018, Dinas Peternakan melakukan pendataan populasi *by name by address* sehingga data jumlah populasi 2019 dan seterusnya dapat lebih valid lagi. Dari pendataan populasi tahun 2018 hingga 2022 juga terlihat adanya peningkatan jumlah populasi ternak.

Pada tahun 2022 dalam upaya peningkatan populasi dan produksi daging, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka) sebanyak 27.445 ekor. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah lahir sebanyak 22.088 ekor atau 80,48% dari target. Pelaksanaan IB tergantung dari kesiapan ternak (waktu birahi ternak) dan pelaksanaan IB tidak serentak sehingga yang sudah di IB sebagian masih bunting dan akan lahir pada tahun 2022.

Tabel 2.4. Target Dan Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Untuk Peningkatan Populasi Dan Produksi tahun 2022

No	Kabupaten	Target Akseptor IB	Capaian Akseptor IB	Persentase	Target Bunting	Capaian Bunting	Persentase	Target Lahir IB dan KA	Capaian Lahir	Persentase
1	Kuantan Singingi	6.000	6.218	103,63 %	5.124	2.936	57,30%	3.828	3.705	96,79%
2	Indragiri Hulu	6.600	6.197	93,89%	5.268	2.434	46,20%	4.214	3.171	75,25%
3	Indragiri Hilir	800	1.152	144,00 %	754	152	20,17%	565	368	65,11%
4	Pelalawan	1.500	817	54,47%	1.450	285	19,66%	1.090	259	23,76%
5	Siak	3.500	2.974	84,97%	3.800	1.946	51,21%	2.810	2.656	94,52%
6	Kampar	7.000	6.349	90,70%	8.619	4.920	57,08%	6.728	6.415	95,35%
7	Rokan Hulu	6.000	5.117	85,28%	6.001	3.579	59,64%	4.530	3.060	67,55%
8	Rokan Hilir	1.300	646	49,69%	1.350	267	19,78%	1.015	361	35,57%
9	Bengkalis	2.200	2.013	91,50%	2.020	1.191	58,96%	1.515	1.148	75,78%
10	Kep. Meranti	150	128	85,33%	185	94	50,81%	140	52	37,14%
11	Pekanbaru	100	53	53,00%	70	8	11,43%	50	9	18,00%
12	Dumai	1.150	1.047	91,04%	1.285	545	42,41%	960	884	92,08%
TOTAL		36.300	32.711	90,11%	35.926	18.357	51,01%	27.445	22.088	80,48%

Sumber Data : iSIKHNAS 2022, data diolah

Dari tabel 2.4. dapat dilihat bahwa target akseptor IB sebanyak 36.300 ekor. Dari target 36.300 ekor yang akan di IB, terealisasi IB nya sebanyak 32.711 ekor sapi dan ini tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Dan dari 32.711 ekor sapi yang di IB pada tahun 2022 yang telah berhasil bunting selama tahun 2022 sebanyak 18.357 ekor. Selama tahun 2022 ditargetkan akan lahir 27.445 ekor yang merupakan hasil dari Inseminasi Buatan dan Kawin alam. Target kelahiran ini merupakan terget dari sebagaian hasil IB tahun 2021 dan sebagian hasil IB tahun 2022. Hal ini karena sapi mempunyai masa bunting selama 9 bulan, jadi bukan berarti bahwa sapi yang lahir tahun 2022 merupakan hasil IB tahun 2022 saja melainkan juga hasil dari IB tahun 2021. Dari 27.445 ekor yang ditargetkan akan lahir, sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebanyak 22.088 ekor (80,48%), selebihnya ternak yang saat tahun 2022 bunting diperkirakan akan melahirkan pada tahun 2023.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Selama periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan

tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau, setelah dilakukan diidentifikasi permasalahan maka permasalahan dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah
			Angka Kelahiran INKA rendah
			Jumlah bibit ternak terbatas
			Kualitas bibit ternak tidak unggul
			Kurang pakan berkualitas
		Skala usaha peternakan kecil	Terbatasnya modal usaha
			Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
			Peternak belum berorientasi bisnis
		Prasarana produksi peternakan belum memadai	Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
		Kompetensi SDM Peternakan yang terbatas	Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
			Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
			Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
			Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal	Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
			Pelayanan veteriner belum maksimal
			Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal	Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
			Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan khususnya terhadap ternak peliharaan.
- b. Belum lengkapnya sarana prasarana Puskesmas di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
- c. Produksi daging yang dihasilkan petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Para investor yang belum begitu berminat dalam berinvestasi pada sub sektor peternakan, mengingat jenis peternakan mengandung resiko tinggi (*high risk*) terutama kualitas hasil produksi yang masih rendah.

Peluang :

- a. Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis peternakan;
- b. Peluang pasar ternak dan produk peternakan khususnya pasar antara pulau sangat terbuka.
- c. Tingkat konsumsi produk ternak terutama daging dan telur cukup tinggi dan cenderung sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan penduduk;
- d. Kebijakan swasembada daging baik tingkat provinsi maupun nasional;
- e. Melemahnya potensi pasokan dari beberapa wilayah sentra produksi ternak nasional sementara konsumsi pada tingkat nasional terus mengalami peningkatan,

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program.

Dari isu-isu penting tersebut di atas selanjutnya diformulasi dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan populasi ternak
- b. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan

- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
- d. Membangun kemitraan antar stekholder dalam mengembangkan komoditas unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- e. Meningkatnya penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal di masyarakat.

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD merupakan proses membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perencanaan peternakan. Analisis kebutuhan diperoleh dengan cara menguraikan semua hasil usulan yang disampaikan melalui tahapan Pertemuan Forum PD dan Rapat Koordinasi Teknis yang telah dilaksanakan antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat fisik (utama) pembangunan peternakan.

Adapun kesesuaian antara RKPD dengan kebutuhan yaitu program dan kegiatan yang tertuang didalam Renja PD memuat dari berbagai usulan kegiatan rutin dinas yang menjadi urusan tupoksi dinas teknis dan usulan dari Dinas yang menangani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten dan Kota.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka ada beberapa kegiatan dan Sub pada RKPD dan Renja yang mengalami perubahan karena kegiatan/sub kegiatan tersebut tidak ada lagi di Kepmendagri tersebut. Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami perubahan kemudian di RKPD dan di Renja disesuaikan, begitu juga dengan indikator dan tergetnya.

Dari hasil review, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator, target kinerja dan pagu anggaran Hasil Analisis Kebutuhan tidak ada perbedaan dengan dengan RKPD dengan pagu Rp. 57.429.789.934,-.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6. Review terhadap RKPD Tahun 2024
Provinsi Riau (Tabel T.C. 31)**

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				57.429.789.934	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				57.429.789.934	
					42.332.066.499					42.332.066.499	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	Persentase 6.149.919.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	Persentase 6.149.919.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2	Kelompok 350.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2	Kelompok 350.000.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	Laporan 350.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	Laporan 350.000.000	
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	1.350	Ton 624.804.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	1.350	Ton 624.804.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab. Inhu, Kab. Kampar dan Kab. Siak	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	Laporan 624.804.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab. Inhu, Kab. Kampar dan Kab. Siak	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	Laporan 624.804.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran (Persentase)	13,20	Persentase 1.995.385.000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran (Persentase)	13,20	Persentase 1.995.385.000	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	Laporan 161.555.000	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	Laporan 161.555.000	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	12	Laporan 1.711.070.000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	12	Laporan 1.711.070.000	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	12 Kab/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Dokumen)	300	Dokumen 122.760.000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	12 Kab/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Dokumen)	300	Dokumen 122.760.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	340	Bibit	3.179.730.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	340	Bibit	3.179.730.000	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Kuansing, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kep. Meranti	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	34.000	Ekor	3.179.730.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kab. Kuansing, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kep. Meranti	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	34.000	Ekor	3.179.730.000	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	1.701.863.500	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	1.701.863.500	
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27	Persentase	1.701.863.500	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27	Persentase	1.701.863.500	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kab. Kuansing, Kab. Inhu, Kab. Inhil, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	Unit	1.701.863.500	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Kab. Kuansing, Kab. Inhu, Kab. Inhil, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	Unit	1.701.863.500	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1. Persentase Angka Kematian ternak (Persentase)	2.2	Persentase	4.949.099.432	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1. Persentase Angka Kematian ternak (Persentase)	2.2	Persentase	4.949.099.432	
			2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (persentase)	10,0	Persentase				2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (persentase)	10,0	Persentase		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (persentase)	10	Persentase	3.783.438.650	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (persentase)	10	Persentase	3.783.438.650	
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan (Wilayah)	24	Wilayah	209.520.000	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	12 Kab/Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan (Wilayah)	24	Wilayah	209.520.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	Laporan	3.573.918.650	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	Laporan	3.573.918.650	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persentase)	90	Persentase	702.803.750	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persentase)	90	Persentase	702.803.750	
	Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kuansing, Kab. Inhil, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan /atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	Laporan	702.803.750	Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kab. Kuansing, Kab. Inhil, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Rohil	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan /atau pengeluaran HPM (Laporan)	60	Laporan	702.803.750	
	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29	Unit	462.857.032	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29	Unit	462.857.032	
	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	12 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	56	Dokumen	328.736.340	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	12 Kab/Kota	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	56	Dokumen	328.736.340	
	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	30	Orang	134.120.692	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12 Kab/Kota	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	30	Orang	134.120.692	
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	9	Persentase	2.318.423.924	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)	9	Persentase	2.318.423.924	
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	77	Kelompok	2.004.757.435	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	77	Kelompok	2.004.757.435	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	Kelompok	2.004.757.435	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	Kelompok	2.004.757.435	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Kelompok Ternak yang Menerapkan Sistem Agribisnis (Kelompok)	60 Kelompok	313.666.489	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Kelompok Ternak yang Menerapkan Sistem Agribisnis (Kelompok)	60 Kelompok	313.666.489	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Siak dan Kab. Rohul	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2 Unit	313.666.489	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Siak dan Kab. Rohul	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2 Unit	313.666.489	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100 Persentase	27.212.760.643	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100 Persentase	27.212.760.643	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	131.543.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12 Dokumen	131.543.400	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dokumen	131.543.400	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	131.543.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	1 Laporan	20.954.871.988	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)	1 Laporan	20.954.871.988	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1.404 Orang/Bulan	20.954.871.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1.404 Orang/Bulan	20.954.871.988	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	1 laporan	241.193.805	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	1 laporan	241.193.805	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	241.193.805	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pekanbaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1 Dokumen	241.193.805	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Laporan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis)	5 Jenis Dokumen	1.306.197.759	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Laporan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis)	5 Jenis Dokumen	1.306.197.759	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	55.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	55.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	329.457.563	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	329.457.563	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	201.336.660	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	201.336.660	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Paket	157.408.536	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	Paket	157.408.536	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	562.995.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	Laporan	562.995.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	4	Unit	3.892.923.691	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	4	Unit	3.892.923.691	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.280.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.280.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	1.099.700.011	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	1.099.700.011	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	95.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	95.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	2.692.543.680	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	2.692.543.680	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	686.030.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	686.030.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit	44.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	Unit	44.030.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	Unit	614.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	Unit	614.950.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	Unit	27.050.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	Unit	27.050.000	
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK						5.540.446.085						5.540.446.085	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)	2	Persentase	2.477.399.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)	2	Persentase	2.477.399.000	
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	55.000	Dosis	2.092.979.000	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	55.000	Dosis	2.092.979.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	12	Laporan	2.092.979.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	12	Laporan	2.092.979.000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	340	Bibit	384.420.000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	340	Bibit	384.420.000	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Pekanbaru	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	6	Ekor	384.420.000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kota Pekanbaru	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	6	Ekor	384.420.000	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	2.762.149.725	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	2.762.149.725	
	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	2.762.149.725	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	2.762.149.725	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	6 Unit	2.762.149.725	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	6 Unit	2.762.149.725	
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100 Persentase	300.897.360	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100 Persentase	300.897.360	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	1 Jenis	20.994.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	1 Jenis	20.994.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	20.994.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	20.994.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1 Jenis	279.903.360	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	1 Jenis	279.903.360	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	279.903.360	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	279.903.360	
UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN					6.186.677.750					6.186.677.750	
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27 Persentase	780.802.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27 Persentase	780.802.000	
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27 Persentase	780.802.000	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27 Persentase	780.802.000	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Kota Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3 Unit	190.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Kota Pekanbaru	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3 Unit	190.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	590.802.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	590.802.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Angka Kematian ternak (Persentase)	2,2	persentase	3.475.354.232	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Angka Kematian ternak (Persentase)	2,2	persentase	3.475.354.232	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (persentase)	10	persentase	2.012.216.496	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (persentase)	10	persentase	2.012.216.496	
	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	12	Laporan	2.012.216.496	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Kota Pekanbaru	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)	12	Laporan	2.012.216.496	
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet (Unit)	25	unit	1.463.137.736	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet (Unit)	25	unit	1.463.137.736	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	270	Dokumen	1.463.137.736	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pekanbaru	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	270	Dokumen	1.463.137.736	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100	Persentase	1.930.521.518	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100	Persentase	1.930.521.518	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	430.764.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	430.764.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	387.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	387.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	28.264.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	28.264.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Pekanbaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	Paket	15.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis)	3	Jenis	918.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis)	3	Jenis	918.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	Unit	653.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	Unit	653.500.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Unit	80.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	Unit	80.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	103	Unit	185.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	103	Unit	185.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	2	Jenis	461.007.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	2	Jenis	461.007.520	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	411.007.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	411.007.520	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	120.249.998	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	Jenis	120.249.998	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	Unit	14.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	17	Unit	14.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	Unit	31.249.998	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3	Unit	31.249.998	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	Unit	75.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN				Jenis	3.370.599.600				Jenis	3.370.599.600			
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)	2	Persentase	1.435.402.560	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)	2	Persentase	1.435.402.560	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	20	Bibit	1.435.402.560	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)	20	Bibit	1.435.402.560	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	12	Laporan	1.435.402.560	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Kampar	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	12	Laporan	1.435.402.560	
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	1.064.692.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)	27	Persentase	1.064.692.000	
	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27	Persentase	1.064.692.000	Penataan Prasarana Pertanian		Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)	27	Persentase	1.064.692.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	4	Unit	1.064.692.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	4	Unit	1.064.692.000	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100	Persentase	870.505.040	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)	100	Persentase	870.505.040	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	258.440.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	258.440.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	100.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	21.320.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	21.320.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	Paket	137.120.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	Paket	137.120.000	

No	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis)	2	Jenis	30.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis)	2	Jenis	30.400.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	Unit	30.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	Unit	30.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	531.665.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	3	Jenis	531.665.040	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	48.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	28.810.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	Laporan	28.810.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	454.855.040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Laporan	454.855.040	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	1	Jenis	50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	1	Jenis	50.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	Unit	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024, disamping berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, juga mempertimbangkan hasil dari Forum PD Provinsi Riau Tahun 2023 serta berdasarkan Surat Edaran Gubernur Riau tentang Penetapan Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah (PD). Program Kegiatan dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan kabupaten/kota se Provinsi Riau dari hasil dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan tahun 2024 Provinsi Riau **(Tabel T-C.32)**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Catatan
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1.85 Persen	
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH	2 Kelompok	
a	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Kuansing & Kampar	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	(Penetapan Standar Daerah/SNI untuk ternak Asli Riau yaitu Sapi Kuantan dan Kerbau Kuntu)
2	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	1.350 Ton	
a	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Inhu, Kampar & Siak	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan	(Peningkatan Kompetensi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pakan ditingkat UPP dan Bank Pakan).
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Angka kelahiran (Persen)	13.20 Persen	
a	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Kab/Kota	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	12 Laporan	Akseptor : 37.500 Ekor N2 Cair : 29.000 Ekor Semen Beku Bali : 30.000 Ekor Pelayanan Kelahiran : 5.000 Ekor

					Operasional Kebuntingan : 20.000 Ekor
4	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang disediakan	340 ST	
	a Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kuansing, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	34.000 Ekor	Pengadaan ternak ayam KUB. (Prioritas Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan	27 Persen	
1	Penataan Prasarana Pertanian		Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana	27 Persen	
	a Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	(Pengadaan Limbah 22 Unit, Pengadaan Sapi Pejantan Pesisir 8 Ekor)
III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1. Persentase Angka Kematian Ternak	2.2 Persen	
			2. Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan penjaminan hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (persen)	10 Persen	
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase penurunan kasus PHMS (%)	10 Persen	
	a Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Kab/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	36 Laporan	Yandu : 40.000 Ekor Gangrep : 1.000 Ekor Vaksinasi Rabies : 26.400 Ekor
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90 Persen	
	a Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	12 Kab/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	60 Laporan	(Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi)
3	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)	29 Unit	
	a Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan		Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk	56 Sertifikat	(Jumlah Unit Usaha

	Produk Hewan		Hewan		akan disertifikasi dan di surveillance)
IV	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	9 Persen	
1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	77 Kelompok	
	a Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	12 Kab/Kota	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	661 Kelompok	(Jumlah Kelompok yang Dibina oleh Pentugas Pendamping)
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60 Kelompok	
	a Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Rohul dan Siak	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	2 Laporan	

Dari hasil Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dapat dilihat bahwa usulan program kegiatan kabupaten/kota sejalan dengan program kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Pada kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Provinsi lain, usulan dari Kab/Kota adalah pengadaan ternak ayam. Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memprioritaskan pada pengadaan ternak ayam yang bertujuan untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan usulan Kab/Kota terutama kabupaten yang termasuk dalam zona kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Dari hasil usulan kabupaten dan kesepakatan pada forum OPD kabupaten meranti mendapatkan alokasi 10 kelompok, Kabupaten Rokan Hulu 7 kelompok, Kabupaten Kuansing 7 kelompok, Kabupaten Kampar 7 kelompok dan Kabupaten Pelalawan 3 kelompok.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan : visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan good Breeding dan good Farming Practises.

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta *monitoring*, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan Kesehatan hewan

Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki produk

hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.
- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian yang berkaitan langsung dengan rumusan kebijakan Ditjen PKH yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing

pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Bila ditelaah Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020-2024 dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dengan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan *sharing* kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomot 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah dibidang peternakan sesuai dengan kewenangan Provinsi dan tugas dinas teknis lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan maka misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2020–2024, sebagai berikut :

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- b. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- d. Mewujudkan peningkatan kinerja ASN dan pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 kepala daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Misi kepala daerah yang ketiga yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah yang berkaitan dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Sasaran				
			Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		NTUP Sub Sektor Peternakan	98,18	99,76	102,35	103,50	104,20
	Meningkatnya produksi daging	Produksi daging (Ton)	58.751	65.408	61.096	62.303	63.535
	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)	94,10	94,10	96,6	97,3	98,0
		Persentase Peningkatan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	-	-	5%	5%	5%

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan Memperkuat Peran Sub Sektor Peternakan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Peternakan (NTUP Peternakan). Sasaran Strategis dinas adalah meningkatnya produksi daging dan Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Peningkatan produksi daging dicapai dengan upaya menambah jumlah populasi ternak, meningkatkan kapasitas SDM bidang peternakan dan meningkatkan skala usaha peternakan. Peningkatan populasi pada ruminansia dilakukan dengan strategi meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan, meningkatkan keberhasilan kawin alam, meningkatkan jumlah dan kualitas bibit ternak dan pemenuhan pakan ternak. Sedangkan upaya untuk meningkatkan skala usaha peternakan adalah dengan peningkatan fasilitasi

permodalan kelompok usaha peternakan dan peningkatan usaha agribisnis peternakan melalui pemanfaatan limbah ternak dan pengembangan kawasan peternakan.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penanganan dan pengendalian penyebaran penyakit pada ternak. Upaya untuk pengendalian penyakit tersebut dilakukan dengan pemantauan penyakit hewan dan peningkatan pelayanan veteriner melalui pengembangan sarana dan prasarana UPT. RSH, pelayanan dan pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta dengan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi.

Pengendalian juga dilakukan pada sektor hilir hingga pengolahan dan pemasaran pangan asal ternak ini. Untuk itu akan didorong para pelaku usaha produk peternak untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan produk pangan asal ternak sehingga aman, sehat utuh dan halal (ASUH).

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses perencanaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Agar tujuan Gubernur dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan, maka Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama peningkatan pendapatan peternak.

Pengembangan peternakan di Provinsi Riau terutama ternak ruminansia ditinjau dari aspek sumberdaya lahan disarankan dengan pola pengembangan intensifikasi dan keterpaduan.

Pola intensifikasi dan keterpaduan tidak memerlukan lahan tersendiri yang khusus untuk pengembangan peternakan, namun dapat diintegrasikan dengan usaha lainnya, sehingga sangat tergantung pada penggunaan lahannya. Pada pola ini, pemeliharaan ternak tidak terlalu terpaku pada keberadaan lahan kosong. Keberadaan wilayah pengembangan peternakan terdapat di sentra-sentra pengembangan perkebunan dan tanaman pangan. Di wilayah perkebunan, keberadaan lahan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai tempat penanaman rumput pakan ternak sebagai tanaman sela dan pemanfaatan limbah agroindustry. Sedangkan di wilayah pengembangan tanaman pangan, limbah hasil pertanian merupakan penyedia hijauan pakan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan terutama pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan seperti daging, telur dan susu. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap daging dan hasil ternak lainnya. Pemenuhan kebutuhan daging ruminansia di Provinsi Riau dari produksi lokal hanya sebesar 24%, selebihnya dipenuhi dari ternak yang didatangkan dari luar provinsi dan daging beku. Kondisi ini menggambarkan masih terjadi kekurangan pasokan daging dan sekaligus menjadi peluang bagi pengembangan ternak di Provinsi Riau.

Dalam upaya untuk meningkatkan produksi daging, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Peternakan telah melaksanakan beberapa Program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan populasi ternak terutama sapi, kerbau dan kambing.

Untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim, Dinas Peternakan juga merencanakan pengadaan ternak unggul yang akan didistribusikan ke kelompok-kelompok peternak dengan prioritas pada kabupaten yang tinggi kemiskinan ekstrimnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2024 sesuai dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mewujudkan misi ke-3 dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Riau tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Program	Pagu Anggaran
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.062.720.560
2.	Program Penyuluhan Pertanian	2.318.423.924
3.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.309.507.225
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	8.424.453.664
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	30.314.684.561
		57.429.789.934

Penjabaran rincian rencana kegiatan dan sub kegiatan tiap program pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel. 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 (Tabel. T-C.33)

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				57.429.789.934				73.765.500.000
								42.332.066.499				54.431.500.000
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)		1,85 Persen	6.149.919.000				9.800.000.000
3	27	02	103	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	2 Kelompok	350.000.000			2 Kelompok	500.000.000
3	27	02	103	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	Kab. Kuantan Singingi dan Kab. Kampar	1 Laporan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	500.000.000
3	27	02	104	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)		1350 Ton	624.804.000				800.000.000
3	27	02	104	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	Kab. Inhu, Kab. Kampar dan Kab. Siak	1 Laporan	624.804.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	800.000.000
3	27	02	105	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persentase)		13,2 Persen	1.995.385.000			13,2 Persen	3.500.000.000
3	27	02	105	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	12 Kab/Kota	1 Laporan	161.555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6 Laporan	300.000.000
3	27	02	105	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	12 Kab/Kota	12 Laporan	1.711.070.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	3.000.000.000
3	27	02	105	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Dokumen)	12 Kab/Kota	300 Dokumen	122.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	300 Dokumen	200.000.000
3	27	02	107	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)		340 Bibit	3.179.730.000				5.000.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 27 02 107 0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain					Kab. Kuansing, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kep. Meranti	34000 Ekor	3.179.730.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		34000 Ekor	5.000.000.000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						27 Persentase	1.701.863.500			27 Persentase	2.800.000.000
3 27 03 101	Penataan Prasarana Pertanian						27 Persentase	1.701.863.500			27 Persentase	2.800.000.000
3 27 03 101 0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan					Kab. Kuansing, Kab. Inhu, Kab. Inhil, Kab. Pelalawan, Kab. Siak, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis dan Kota Dumai	1 Unit	1.701.863.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	2.800.000.000
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						2.2 Persentase	4.949.099.432			2.2 Persentase	5.850.000.000
							10 Persentase				10 Persentase	0
3 27 04 101	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						10 Persentase	3.783.438.650				4.350.000.000
3 27 04 101 0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan					12 Kab/Kota	24 Wilayah	209.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		24 Wilayah	350.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	04	101	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	12 Kab/Kota	36 Laporan	3.573.918.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		36 Laporan	4.000.000.000
3	27	04	102		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persentase)		90 Persentase	702.803.750			90 Persentase	850.000.000
3	27	04	102	0007	Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan /atau pengeluaran HPM (Laporan)	Kab. Kuansing, Kab. Inhil, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu dan Kab. Rohil	60 Laporan	702.803.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Laporan	850.000.000
3	27	04	104		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)		29 Unit	462.857.032				650.000.000
3	27	04	104	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	12 Kab/Kota	56 Dokumen	328.736.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		56 Sertifikat	550.000.000
3	27	04	104	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12 Kab/Kota	30 Orang	134.120.692	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	100.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)		9 Persentase	2.318.423.924				3.150.000.000
3	27	07	102		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)		77 Kelompok	2.004.757.435				2.750.000.000
3	27	07	102	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	12 Kab/Kota	661 Kelompok	2.004.757.435	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		661 Kelompok	2.750.000.000
3	27	07	103		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelompok Ternak yang Menerapkan Sistem Agribisnis (Kelompok)		60 Kelompok	313.666.489				400.000.000
3	27	07	103	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Kab. Siak dan Kab. Rohul	2 Unit	313.666.489	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	400.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)		100 Persentase	27.212.760.643				32.831.500.000
3	27	01	101		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		12 Dokumen	131.543.400			12 Dokumen	200.000.000
3	27	01	101	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru	5 Dokumen	131.543.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	200.000.000
3	27	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi (Laporan)		1 Laporan	20.954.871.988			1 Laporan	25.000.000.000
3	27	01	102	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Kota Pekanbaru	1404 Orang/ Bulan	20.954.871.988	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1500 Orang/ Bulan	25.000.000.000
3	27	01	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)		1 laporan	241.193.805			1 laporan	175.000.000
3	27	01	103	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Kota Pekanbaru	1 Dokumen	241.193.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	175.000.000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Laporan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis)		5 Jenis	1.306.197.759				1.865.000.000
3	27	01	106	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Pekanbaru	1 Paket	55.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	65.000.000
3	27	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Pekanbaru	2 Paket	329.457.563	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	200.000.000
3	27	01	106	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Pekanbaru	1 Paket	201.336.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	750.000.000
3	27	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Kota Pekanbaru	1 Paket	157.408.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	150.000.000
3	27	01	106	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	12 Laporan	562.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	700.000.000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)		4 Unit	3.892.923.691				4.631.500.000
3	27	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Kab/Kota dan Luar Provinsi Riau	1 Laporan	5.280.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	6.500.000
3	27	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kota Pekanbaru	12 Laporan	1.099.700.011	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.250.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01	108	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kota Pekanbaru	1 Laporan	95.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	125.000.000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kota Pekanbaru	12 Laporan	2.692.543.680	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	3.250.000.000
3	27	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	686.030.000			3 Jenis	960.000.000
3	27	01	109	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kota Pekanbaru	1 Unit	44.030.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	60.000.000
3	27	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Kota Pekanbaru	16 Unit	614.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Unit	850.000.000
3	27	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kota Pekanbaru	18 Unit	27.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Unit	50.000.000
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK									5.540.446.085				6.272.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)		1,85 Persentase	2.477.399.000			1,85 Persentase	3.450.000.000
3	27	02	104		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)		55000 Dosis	2.092.979.000			55000 Dosis	3.000.000.000
3	27	02	104	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	Kota Pekanbaru	12 Laporan	2.092.979.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	3.000.000.000
3	27	02	107		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)		340 Bibit	384.420.000				450.000.000
3	27	02	107	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)	Kota Pekanbaru	6 Ekor	384.420.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Ekor	450.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)		27 Persentase	2.762.149.725				2.500.000.000
3	27	03	101		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)		27 Persentase	2.762.149.725				2.500.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	27	03	101	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	Kota Pekanbaru	6 Unit	2.762.149.725	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Unit	2.500.000.000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)		100 Persentase	300.897.360			100 Persentase	322.000.000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)		1 Jenis	20.994.000			1 Jenis	22.000.000
3	27	01	106	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kota Pekanbaru	1 Paket	20.994.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	22.000.000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)		1 Jenis	279.903.360				300.000.000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kota Pekanbaru	12 Laporan	279.903.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	300.000.000
UPT. LABORATORIUM VETERINER & KLINIK HEWAN									6.186.677.750				8.655.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)		27 Persentase	780.802.000				1.300.000.000
3	27	03	101		Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)		27 Persentase	780.802.000				1.300.000.000
3	27	03	101	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	Kota Pekanbaru	3 Unit	190.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	gedung instalasi Rawat Inap dan PET Hotel	3 Unit	300.000.000
3	27	03	101	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	Kota Pekanbaru	4 Unit	590.802.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	pemasangan instalasi listrik 7 unit & UPS , rehap pagar dan pagar batas, lanscape	3 Unit	1.000.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian temak (Persentase)		2,2 persentase	3.475.354.232				4.500.000.000
3	27	04	101		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (persentase)		10 persentase	2.012.216.496				2.750.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 27 04 101 0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan					Kota Pekanbaru	12 Laporan	2.012.216.496	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	portabel X Ray	12 Laporan	2.750.000.000
3 27 04 103	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						25 unit	1.463.137.736				1.750.000.000
3 27 04 103 0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					Kota Pekanbaru	270 Dokumen	1.463.137.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	kamera visualisasi PCR	270 Dokumen	1.750.000.000
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						100 Persentase	1.930.521.518		-		2.855.000.000
3 27 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3 Jenis	430.764.000			3 Jenis	565.000.000
3 27 01 106 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kota Pekanbaru	1 Paket	387.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	500.000.000
3 27 01 106 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kota Pekanbaru	1 Paket	28.264.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	30.000.000
3 27 01 106 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kota Pekanbaru	1 Paket	15.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	35.000.000
3 27 01 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3 Jenis	918.500.000			3 Jenis	1.550.000.000
3 27 01 107 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kota Pekanbaru	20 Unit	653.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	exhaust fan dan genset	20 Unit	750.000.000
3 27 01 107 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kota Pekanbaru	1 Unit	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	500.000.000
3 27 01 107 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kota Pekanbaru	103 Unit	185.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		103 Unit	300.000.000
3 27 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2 Jenis	461.007.520			2 Jenis	565.000.000
3 27 01 108 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kota Pekanbaru	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	65.000.000
3 27 01 108 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kota Pekanbaru	12 Laporan	411.007.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	500.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)		3 Jenis	120.249.998			3 Jenis	175.000.000
3	27	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kota Pekanbaru	17 Unit	14.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	25.000.000
3	27	01	109	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Pekanbaru	3 Unit	31.249.998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	50.000.000
3	27	01	109	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Kota Pekanbaru	22 Unit	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	100.000.000
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN									3.370.599.600				4.407.000.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)		1,85 Persentase	1.435.402.560				1.750.000.000
3	27	02	105		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)		20 Bibit	1.435.402.560				1.750.000.000
3	27	02	105	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)	Kab. Kampar	12 Laporan	1.435.402.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	1.750.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persentase)		27 Persentase	1.064.692.000		jalan produksi UPT.PTP		1.500.000.000
3	27	03	101		Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)		27 Persentase	1.064.692.000		jalan produksi UPT.PTP 1.200 M; excapator mini 1 ton dan mobil pengangkut 2 unit	27 Persentase	1.500.000.000
3	27	03	101	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	Kab. Kampar	4 Unit	1.064.692.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	jalan produksi UPT.PTP 1.200 M; excapator mini 1 ton dan mobil pengangkut 2 unit	5 Unit	1.500.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		100 Persentase	870.505.040			100	1.157.000.000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)		3 Jenis	258.440.000			6	272.000.000
3	27	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Kampar	1 Paket	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	100.000.000
3	27	01	106	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Kampar	1 Paket	21.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	22.000.000
3	27	01	106	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Kab. Kampar	1 Paket	137.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	150.000.000
3	27	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis)		2 Jenis	30.400.000			2 Jenis	100.000.000
3	27	01	107	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Kab. Kampar	5 Unit	30.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Unit	100.000.000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)		3 Jenis	531.665.040				715.000.000
3	27	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Kab. Kampar	12 Laporan	48.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	185.000.000
3	27	01	108	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Kampar	1 Laporan	28.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	30.000.000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Kampar	12 Laporan	454.855.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	500.000.000
3	27	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)		1 Jenis	50.000.000			1 Jenis	70.000.000
3	27	01	109	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Kampar	12 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Unit	70.000.000

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp57.429.789.934,- dan perkiraan maju rencana tahun 2025 sebesar Rp. 73.765.500.000- dengan uraian sebagai berikut :

Pada Renja Tahun 2024, Program Kegiatan Dinas dan UPT lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau anggarannya terpisah. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di Dinas, anggaran sebesar Rp 6.149.919.000,- pada tahun 2024 dan untuk tahun 2025 sebesar Rp 9.800.000.000,-. Sedangkan di UPT Inseminasi Buatan Ternak, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2024 sebesar 2.477.399.000,- dan tahun 2025 sebesar 3.450.000.000,- . Pada UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian tahun 2024 sebesar 1.435.402.560,- dan tahun 2025 sebesar 1.750.000.000,-.

Pagu anggaran Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian tahun 2024 sebesar 1.701.863.500,- dan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,-. Sedangkan di UPT. Inseminasi Buatan Ternak pada program yang sama untuk tahun 2024 anggarannya sebesar 2.762.149.725,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Pada UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tahun 2024 sebesar 780.802.000,- dan tahun 2025 sebesar 1.300.000.000,-, sedangkan di UPT Pengembangan Ternak dan Pakan anggaran pada program ini tahun 2024 sebesar Rp. 1.064.692.000,- dan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,-

Program Penyuluhan Pertanian direncanakan anggaran tahun 2024 sebesar 2.318.423.924,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 3.150.000.000,-. Anggaran Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner tahun 2024 sebesar 4.949.099.432,- dan tahun 2025 sebesar 5.850.000.000,-. Sedangkan di UPT. Laboratorium Veteriner dan klinik Hewan anggaran untuk program ini tahun 2024 sebesar 3.475.354.232,- dan tahun 2025 sebesar 4.500.000.000,-.

Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp. 27.212.760.643,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 32.831.500.000,-. Pada UPT. Inseminasi Buatan Ternak pada program yang

sama untuk tahun 2024 anggarannya sebesar 300.897.360,- dan tahun 2025 sebesar Rp. 322.000.000,-. Pada UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tahun 2024 sebesar 1.930.521.518,- dan tahun 2025 sebesar 2.855.000.000,- sedangkan di UPT Pengembangan Ternak dan Pakan anggaran pada program ini tahun 2024 sebesar Rp. 870.505.040,- dan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.157.000.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 :

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						42.332.066.499,00							54.431.500.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						42.332.066.499,00							54.431.500.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Provinsi	 <													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		0	1	1	241.193.805,00 241.193.805,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1	175.000.000,00 175.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)				5.00	1.306.197.759,00							1.865.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	55.000.000,00 55.000.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	1	65.000.000,00 65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	2	329.457.563,00 329.457.563,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.00	200.000.000,00 200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	3.00	1	201.336.660,00 201.336.660,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	3.00	750.000.000,00 750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1	1	1	157.408.536,00 157.408.536,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	1	150.000.000,00 150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12.00	12.00	12.00	562.995.000,00 562.995.000,00	(12 Kabupaten / Kota dan Luar Provinsi, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12.00	700.000.000,00 700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi (Jenis)				4.00	3.892.923.691,00							4.631.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1	1	1	5.280.000,00 5.280.000,00	(12 Kabupaten / Kota dan Luar Provinsi, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	1	6.500.000,00 6.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	1.099.700.011,00 1.099.700.011,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	12	1.250.000.000,00 1.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	4.00	1	95.400.000,00 95.400.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	4.00	125.000.000,00 125.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	2.692.543.680,00 2.692.543.680,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU	12	3.250.000.000,00 3.250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)				3	686.030.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)					3	960.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		16	1.00	1.00	44.030.000,00 44.030.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1.00	60.000.000,00 60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laoanoan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		34	19.00	16.00	614.950.000,00 614.950.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	16.00	850.000.000,00 850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7	4	18.00	27.050.000,00 27.050.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	18	50.000.000,00 50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)				1.85	6.149.919.000,00							9.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)				2.00	350.000.000,00	(Kuantan Singingi dan Kampar, RIAU)					2	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)		1	1	1	350.000.000,00	(Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok yang Mengembangkan SDGH	1	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenanaan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)				1.35	624.804.000,00							800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)		1	1	1	624.804.000,00	(Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Siak, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1	800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenanaan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persentase)				13.2	1.995.385.000,00	(RIAU)					13.2	3.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)		6.00	6.00	1.00	161.555.000,00 161.555.000,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok Ternak 12 Kabupaten/Kota, Perusahaan Unggas, Peternak, Peternak , Peternak Unggas	6.00	300.000.000,00 300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)		12	12	12	1.711.070.000,00 1.711.070.000,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Kabupaten/Kota, Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, Peternak	12	3.000.000.000,00 3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar (Dokumen)		0.00	0.00	300	122.760.000,00 122.760.000,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Usaha	300	200.000.000,00 200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)				340.00	3.179.730.000,00							5.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		490	2210	34000	3.179.730.000,00 3.179.730.000,00	(Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kabupaten Kepulauan Meranti, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Calon Penerima Manfaat, Kelompok Ternak 12 Kab/Kota, Kep. Meranti, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, Masyarakat Miskin, Peternak 12	34000	5.000.000.000,00 5.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Pternakan yang dikembangkan (Persentase)				27.00	1.701.863.500,00							2.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfataakan prasarana (Persentase)				27.00	1.701.863.500,00							2.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)		1.00	1.00	1.00	1.701.863.500,00	(Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kota Dumai)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelompok penerima bantuan	1.00	2.800.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian Ternak - Persentase Peningkatan Unit Usaha Penyedia Produk Hewan yang menerapkan Penjaminan Hygiene Sanitasi, Mutu dan Keamanan Produk (Persentase)				2.20 10.00	4.949.099.432,00							5.850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persentase)				10.00	3.783.438.650,00							4.350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)		0.00	24	24	209.520.000,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 Kabupaten Kota, 12 Kabupaten Kota, 12 Kabupaten Kota	24	350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)		36	36	36	3.573.918.650,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Kabupaten Kota, 12 Kabupaten/Kota, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	36	4.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di check point (Persentase)				90	702.803.750,00	(RIAU)					90	850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (Laporan)		60	60	60	702.803.750,00	(Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Kabupaten Kota	60	850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV (Unit)				29.00	462.857.032,00							650.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)		52	52	56	328.736.340,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Unit Usaha, Petugas Kesmavet, Petugas yang Menangani Kesmavet, Rumah Potong	56	550.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)		30	30	30	134.120.692,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 kabupaten/kota, Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesmavet	30	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk Korporasi (Persentase)				9.00	2.318.423.924,00							3.150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kelompok yang dinaikan Status Kelas Kelompoknya (Kelompok)				77.00	2.004.757.435,00							2.750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)		576	661	661	2.004.757.435,00	(12 Kabupaten / Kota, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Kabupaten/ Kota, Penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha ternak dan kelompok ternak oleh Petugas Penyuluh Lapangan Teknis Peternakan	661	2.750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelompok Ternak yang Menerapkan Sistem Agribisnis (Kelompok)				60.00	313.666.489,00							400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)		0.00	2	2	313.666.489,00	(Kabupaten Siak dan Rokan Hulu, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Peternakan di Lampung, Kelompok di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak yg akan membentuk Korporasi, Kelompok Korporasi di Kabupaten Rohul dan Kabupaten Siak, Pendampingan Kelompok Korporasi di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak	2	400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			J U M L A H					42.332.066.499,00							54.431.500.000,00	

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.540.446.085,00							6.272.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						5.540.446.085,00							6.272.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)</i>				100.00	300.897.360,00							322.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi (Jenis)</i>				1	20.994.000,00	<i>(UPT. Inseminasi Buatan Ternak, KOTA PEKANBARU)</i>					1	22.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		1	1	1	20.994.000,00	<i>(UPT. Inseminasi Buatan Ternak, RIAU)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Inseminasi Buatan Ternak	1	22.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi (Jenis)</i>				1.00	279.903.360,00							300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)</i>		12.00	12.00	12.00	279.903.360,00	<i>(UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK, KOTA PEKANBARU)</i>	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Bertalenta Sains	Ketenagakerjaan	UPT. IBT	12.00	300.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)</i>				1.85	2.477.399.000,00							3.450.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangoan Provinsi	<i>Jumlah produksi pakan unggul (Ton)</i>				1350.00	2.092.979.000,00							3.000.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (laporan)		12.00	12.00	12.00	2.092.979.000,00	(UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kab/kota provinsi Riau, Nasional dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau, UPT. Inseminasi Buatan Ternak	12.00	3.000.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)				340.00	384.420.000,00							450.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain (Ekor)		0.00	7	6	384.420.000,00	(UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Inseminasi Buatan Ternak	6	450.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)				27.00	2.762.149.725,00							2.500.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Persentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)				27.00	2.762.149.725,00							2.500.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		3	7	6	2.762.149.725,00	(UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Inseminasi Buatan Ternak	6	2.500.000.000,00	UPT. INSEMINASI BUATAN TERNAK
			J U M L A H					5.540.446.085,00							6.272.000.000,00	

**FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.125.749.750,00							8.655.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6.125.749.750,00							8.655.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	 													

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	20.00	653.500.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	20.00	750.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	0.00	1.00	80.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	1.00	500.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	7.00	103.00	185.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	103.00	300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi (Jenis)				2	461.007.520,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, KOTA PEKANBARU)					2	565.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	1.00	1.00	50.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	1.00	65.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12.00	12.00	12.00	411.007.520,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	12.00	500.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)				3	120.249.998,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, KOTA PEKANBARU)					3	175.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		3	3.00	17	14.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	5.00	25.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0.00	0.00	3.00	31.249.998,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	3.00	50.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		0.00	0.00	22.00	75.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	22.00	100.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)				27.00	780.802.000,00							1.300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)				27.00	780.802.000,00							1.300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)		0.00	0.00	3.00	190.000.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	3.00	300.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		1.00	0.00	4	590.802.000,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, KOTA PEKANBARU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	3.00	1.000.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Angka Kematian Ternak (Persentase)				2.20	3.414.426.232,00							4.500.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persentase)				10.00	2.012.216.496,00							2.750.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (Laporan)		12.00	12.00	12.00	2.012.216.496,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	12.00	2.750.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis keswan kesmavet (Unit)				25.00	1.402.209.736,00							1.750.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)		324.00	260.00	270.00	1.402.209.736,00	(UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	270.00	1.750.000.000,00	UPT. LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
			J U M L A H					6.125.749.750,00							8.655.000.000,00	

FINAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.370.599.600,00							4.407.000.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.370.599.600,00							4.407.000.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Persentase)				100.00	870.505.040,00							1.157.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis)				3	258.440.000,00	(UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, KAB. KAMPAR)					3	272.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	1.00	1	100.000.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, KAB. KAMPAR)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	2.00	100.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	1	21.320.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1	22.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		0.00	1	1	137.120.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1	150.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)				2	30.400.000,00	(UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, KAB. KAMPAR)					2	100.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0.00	30.00	5	30.400.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	7.00	100.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi (Jenis)				3.00	531.665.040,00							715.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0.00	12	12	48.000.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12	185.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	1	1	28.810.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	1	30.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		12	12	12	454.855.040,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12	500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)				1	50.000.000,00	(UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan, KAB. KAMPAR)					1	70.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		0.00	3.00	12	50.000.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	13.00	70.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persentase)				1.85	1.435.402.560,00							1.750.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenanaan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Bibit)				20.00	1.435.402.560,00							1.750.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi (laporan)		24	24	12	1.435.402.560,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Penembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, UPT Pengembangan Ternak dan PakanDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	12	1.750.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJADAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang dikembangkan (Persentase)				27.000	1.064.692.000,00							1.500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase) Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persentase)				27 63.000	1.064.692.000,00	(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, KOTA PEKANBARU)					27	1.500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)		1.00	9.00	4	1.064.692.000,00	(UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN, RIAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPT Pengembangan Ternak dan Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	5.00	1.500.000.000,00	UPT. PENGEMBANGAN TERNAK DAN PAKAN
			J U M L A H					3.370.599.600,00							4.407.000.000,00	

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 dengan pagu anggaran mengacu pada RKPD Tahun 2024.

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.
3. Rencana tindak lanjut:

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pekanbaru, September 2023
KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE.MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Pattimura Nomor 2 – Pekanbaru, Kode Pos 28131
Telepon (0761) 44341, Faks (0761) 44342
E-mail : dinaspkh@riau.go.id Website : <https://dispkh.riau.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 188/Kpts/DPKH-SEKR/II/2023/~~284~~

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2023**

KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 125 sampai dengan Pasal 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 46);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1276/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Perovinsi Riau An. Rudyanto dan Kawan-kawan.

12. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1457/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
13. Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor : 188/Kpts/DPKH-SEKR/2023/016 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengelola Administrasi & Keuangan Kegiatan (PPAKK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melakukan Pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta melakukan evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya;
 - b. Melakukan koordinasi dan penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Dokumen Kebijakan Lainnya.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023;
 - e. Melakukan analisis dan pengkajian hasil evaluasi rencana kerja tahun sebelumnya, untuk penentuan isu-isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah;
 - f. Perumasan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai target kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
 - g. Terlibat secara penuh dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Riau, di Pekanbaru (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Riau, di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
Nomor : 524/Kpts/PKH-SEKR/II/2023/ 284
Tanggal : 06 Februari 2023

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN 2023

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
1	Ketua	Herman, SE, MT	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Sekretaris	Ayu Susanti, SE	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Sekretariat		
	- Koordinator	Dedy Irawan, SP	Sub Koord. Perencanaan Program
	- Anggota 1	Hamam Ismail, S.Sos	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat
	- Anggota 2	Syed M. Syukri, S.IP	Sub Koord. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	- Anggota 3	Laila Diana, SP. MM	Fungsional Perencana Ahli Muda
	- Anggota 4	Nurkhadijah, S.Pt	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
4	Kelompok Kerja Bidang Produksi Peternakan		
	- Koordinator	Ir. Elly Suryani, M.Si	Kepala Bidang Produksi Peternakan
	- Anggota 1	H. Elyan Buzra, SP, M.Si	Sub Koord. Pakan
	- Anggota 2	Ummi Qoriah, S.Pt	Sub Koord. Budidaya Ternak
	- Anggota 3	Donny Aprizal, S.Pt	Sub Koord. Perbibitan Ternak
5	Kelompok Kerja Bidang Agribisnis Peternakan		
	- Koordinator	Drs. Heri Afrizon, M.Si	Kepala Bidang Agribisnis Peternakan
	- Anggota 1	Elfita Sari Nur, S.Pt	Sub Koord. Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan
	- Anggota 2	M. Eldja Aulia Riza, S.Pi	Sub Koord. Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan
	- Anggota 3	Oryza Febrina, S.Pt, M.IP	Sub Koord. Pengembangan Kawasan Peternakan
6	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Hewan		
	- Koordinator	drh. Faralinda Sari	Kepala Bidang Kesehatan Hewan
	- Anggota 1	drh. Revalita Budhiani	Sub Koord. Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
	- Anggota 2	drh. Adriyan Permana Putra	Sub Koord. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
	- Anggota 3	Salita Syahrial, S.Pt	Sub Koord. Pengamatan Penyakit Hewan
7	Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner		
	- Koordinator	Budhi Iskandar, SE, MBA	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan Struktural / Fungsional
	- Anggota 1	Pipi Desvita, S.Pi	Sub Koord. Higiene Sanitasi
	- Anggota 2	drh. Ade Rukmantara	Sub Koord. Pengawasan Keamanan Produk Hewan
8	Kelompok Kerja UPT. Inseminasi Buatan Ternak		
	- Koordinator	Mariato Syam, ST	Kepala UPT. Inseminasi Buatan Ternak
	- Anggota 1	Erwan Setiawan, SE, MM	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT IBT
	- Anggota 2	Mardianto, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul, Pembibitan Ternak dan Pemeliharaan Hijauan Pakan Ternak
	- Anggota 3	Muhammad Deka Rizky, SE	Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku
9	Kelompok Kerja UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan		
	- Koordinator	drh. Alfianny Irza Zakaria	Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
	- Anggota 1	Dian Agmalia, S.Farm, MKL	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT LVKH
	- Anggota 2	drh. Dewi Anggreini, MM	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
	- Anggota 3	drh. Amir Subagya	Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner
10	Kelompok Kerja UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan		
	- Koordinator	drh. Tuti Wahyu Winanti	Kepala UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan
	- Anggota 1	Zulkarnain Hasan, S.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT IBT
	- Anggota 2	Ekal Hendrayani, S.Pt	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



HERMAN, SE, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199503 1 014